

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Sudarsono
Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Mokhammad Najih

Dwi Sudarsono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah akses pengaduan pelayanan publik	1 Lokasi (Kab/Kota)
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	222 Laporan
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	11 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtangaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	
1	Akses Pengaduan Pelayanan Publik	Rp 40.808.000
2	Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp 411.093.000
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang Bersifat Tematik dan Selektif Khusus Program Prioritas Presiden	Rp 71.020.000
B	Pencegahan Maladministrasi	
1	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp 185.835.000
II	Dukungan Manajemen	
A	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	
1	Layanan Perkantoran	Rp 404.877.000
	Total	Rp 1.113.633.000

Mataram, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Dwi Sudarsono



**DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah akses pengaduan pelayanan publik	1 Lokasi (Kab/Kota)	Merupakan keluaran atas kegiatan akses pengaduan pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan di daerah (Kab/Kota) dengan akses pengaduan ke Ombudsman yang masih rendah. Satuan Lembaga merupakan Kab/Kota tempat dilaksanakan kegiatan akses pengaduan pelayanan publik.	Laporan kegiatan akses pengaduan pelayanan publik	Dihitung berdasarkan jumlah lembaga (Kab/Kota) tempat dilaksanakan kegiatan akses pengaduan pelayanan publik
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan	222 Laporan	Merupakan keluaran atas kegiatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.	Data SIMPeL	Dihitung dengan menjumlahkan seluruh laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026 dan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Ombudsman RI Perwakilan		Laporan yang dimaksud adalah laporan masyarakat yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 di tahap PVL yang tidak memenuhi syarat materil (tidak termasuk penutupan karena tidak memenuhi syarat formil) dan tahap pemeriksaan. Laporan yang diselesaikan merupakan penyelesaian (penutupan) laporan yang ditangani pada tahun 2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i>).		laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i>) $\sum LMS = LMS_1 + LMS_2 + \dots + LMS_n$ $\sum LMS$: Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup) LMS : Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i>)
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas	1 Laporan	Merupakan keluaran atas kegiatan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Laporan yang dimaksud adalah laporan pengawasan Ombudsman melalui investigasi atas	Laporan IAPS	Dihitung berdasarkan jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) pada tahun 2026 bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik		prakarsa sendiri pada tahun 2026 bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik.		
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	11 Pemerintah Daerah	Merupakan keluaran atas kegiatan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang dinilai meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menjadi lokus penilaian opini.	Laporan Hasil Penilaian Opini	Dihitung dengan menjumlah seluruh Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menjadi lokus penilaian opini $\sum PDOP = PDOP_1 + PDOP_2 + \dots + PDOP_n$ $\sum PDOP$: Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik $PDOP$: Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	Merupakan keluaran atas kegiatan layanan perkantoran untuk memastikan operasional dan pemeliharaan kantor dapat terpenuhi selama 1 tahun.	Data penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Dihitung berdasarkan layanan operasional dan pemeliharaan kantor perwakilan yang diberikan